

TEORI PERENCANAAN BAHASA LAUDER & LAUDER DAN APLIKASINYA DALAM KONTEKS BAHASA INDONESIA

**Sudaryanto¹, Zultiyanti², Agnes Yumartati³,
Farah Muthia Saputri⁴, Nungky Nurmalitasari⁵**

^{1, 2, 3, 4, 5}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

¹sudaryanto@pbsi.uad.ac.id

²zultiyanti@pbsi.uad.ac.id

³yumartati@pbsi.uad.ac.id

⁴muthiaf42@yahoo.co.id

⁵nungkynurmalita26@gmail.com

Abstrak

Lauder & Lauder memiliki pandangan bahwa perencanaan bahasa adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Bahasa. Visi Badan Bahasa adalah terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia. Guna mewujudkan visi tersebut, Badan Bahasa memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Tulisan ini berfokus pada pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia semata. Dimulai dari pembahasan UU Nomor 24 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014, diikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016, sampai kegiatan-kegiatan, seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Aksi Pengendalian Bahasa Negara, dan Diplomasi Kebahasaan melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Kata Kunci: *perencanaan bahasa, pengembangan bahasa, pembinaan bahasa, bahasa Indonesia*

Abstract

Lauder & Lauder has a view of language planning carried out by the government or a body appointed by the government, in this case the Language Board. The Vision of the Language Agency for the realization of the people of character and national identity through Indonesian language and literature. In order to realize this vision, the Language Board has the main task of developing, guiding and protecting Indonesian language and literature. This paper challenges the development, formation and protection of the Indonesian language only. Law Number 24 of 2009, then Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 57 of 2014, followed by Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 70 of 2016, to activities, such as the National Literacy Movement (GLN), Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) , Action on Control of State Languages, and Language Diplomacy through Indonesian for Foreign Speakers (BIPA).

Keywords: *language planning, language development, language development, Indonesian*

A. PENDAHULUAN

Dalam tulisan berjudul “Berbagai Kajian Linguistik”, Lauder & Lauder (2007) mengupas salah satu kajian linguistik yang bersifat kajian terapan, yaitu perencanaan bahasa. Lauder & Lauder mendefinisikan perencanaan bahasa adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Pusat Bahasa (kini Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan). Definisi Lauder & Lauder itu bisa disebut semacam “teori” yang, barangkali, patut diaplikasikan ke dalam konteks bahasa Indonesia. Terkait itu, teori perencanaan bahasa Lauder & Lauder akan memiliki perbedaan dibandingkan dengan teori lainnya.

Sementara itu, Kridalaksana (2011) mendefinisikan perencanaan bahasa adalah usaha untuk memperbaiki komunikasi bahasa dengan menciptakan subsistem-subsistem baru atau menyempurnakannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memakainya. Standardisasi peristilahan dalam bidang-bidang kehidupan adalah contoh perencanaan bahasa. Di dalam “teori” itu, Kridalaksana tidak menyebutkan siapa pihak yang melaksanakan perencanaan bahasa sehingga agak kurang jelas dipahami oleh pembaca, padahal di dalam perencanaan bahasa itu harus jelas siapa pihak yang harus melakukannya dan siapa pula pihak yang ditujunya. Dengan demikian, kajian ini akan berfokus terhadap penerapan atau aplikasi teori perencanaan bahasa Lauder &

Lauder dalam konteks bahasa Indonesia

Sejumlah pakar bahasa Indonesia telah menghasilkan kajian-kajian terkait pengutamaan bahasa Indonesia dan/atau tegangan antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, seperti Pastika (2012), Rambu (2016), Paryono (2017), Masreng (2017), Arifin (2018), Harahap (2018), Sudaryanto, dkk. (2018), Anto, dkk. (2019), dan Ridlo, dkk. (2019). Kesembilan kajian itu memiliki fokus yang berbeda dengan kajian ini yang berfokus terhadap aplikasi teori perencanaan bahasa Lauder & Lauder dalam konteks bahasa Indonesia. Sejalan dengan tugas Badan Bahasa, perencanaan bahasa meliputi pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, hasil dari kajian ini dapat melengkapi kajian-kajian tadi.

B. PEMBAHASAN

Uraian ini secara berurutan membahas tentang visi dan misi Badan Bahasa, serta tugas dan fungsi Badan Bahasa. Selanjutnya, pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, diikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran

Berbahasa Indonesia, sampai kegiatan-kegiatan, seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Aksi Pengendalian Bahasa Negara, dan Diplomasi Kebahasaan melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Berdasarkan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2014—2019 ditetapkan visi dan misinya. Visi Badan Bahasa adalah terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia. Misi Badan Bahasa terdiri atas empat butir, yaitu

1. meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakainya;
2. meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan;
3. meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; dan
4. meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan.

Selanjutnya, dari visi dan misi di atas itu diturunkan menjadi tugas dan fungsi Badan Bahasa. Tugas Badan Bahasa adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Fungsi Badan Bahasa terdiri atas lima butir, yaitu

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran

- pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
2. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
4. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. - Kepala Badan Bahasa (2015—2019). **Sumber:** Dokumentasi Pribadi

Sesuai dengan teori perencanaan bahasa Lauder & Lauder di atas, Badan Bahasa pun melakukan kegiatan perencanaan bahasa yang meliputi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Dalam konteks tulisan ini, penulis ingin berfokus ke arah pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia saja. Kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia telah tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Bagian Ketiga dan Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut.

Pasal 41

- (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan bunyi ayat (3) Pasal 44 di atas, terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Di dalam produk hukum itu, tercantum definisi dari istilah “pengembangan bahasa”, “pembinaan bahasa”, dan “pelindungan bahasa”, tepatnya di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Definisi “pengembangan bahasa” ialah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sementara itu, definisi “pembinaan bahasa” ialah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya,

definisi “pelindungan bahasa” ialah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Salah satu usaha pembinaan bahasa Indonesia, khususnya pemasyarakatan bahasa Indonesia ke berbagai lapisan masyarakat menggunakan media sosial, Badan Bahasa menerbitkan unggahan rubrik *Kata Kita Pekan Ini* (Gambar 2), *Tahukah Anda?* (Gambar 3), dan *Ejaan Hari Ini* (Gambar 4) melalui sejumlah media sosialnya, seperti laman (*website*) badanbahasa.kemdikbud.go.id, *Instagram* “*badanbahasakemdikbud*”, *Twitter* “*badanbahasa*”, *Facebook* “*badanbahasa*”, dan surel (*e-mail*) badan.bahasa@kemdikbud.go.id.



Gambar 2. Rubrik *Kata Kita Pekan Ini*
Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id



Gambar 3. Rubrik *Tahukah Anda?*
Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id



Gambar 4. Rubrik *Ejaan Hari Ini*
Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id

Di dalam PP Nomor 57 Tahun 2014, khususnya Pasal 11 ayat (1) disebutkan, “Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk (a) memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan (b) meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.” Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) disebutkan, “Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui: a. penelitian kebahasaan; b. pengayaan kosakata; c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa; d.

penyusunan bahan ajar; e. penyusunan alat uji kemahiran berbahasa; f. penerjemahan; dan g. publikasi hasil pengembangan Bahasa Indonesia.” Kemudian Pasal 11 ayat (3) disebutkan, “Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.”

Berikutnya, Pasal 16 ayat (1) disebutkan, “Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Indonesia dilakukan untuk: a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Indonesia; c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Indonesia; d. menciptakan suasana yang kondusif untuk pembinaan Bahasa Indonesia; dan e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia.” Kemudian Pasal 16 ayat (2) disebutkan, “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia; d. penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.”

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) disebutkan, “Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi

negara.” Kemudian Pasal 27 ayat (2) disebutkan, “Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. pengembangan; c. pembinaan; d. penelitian kebahasaan; e. pendokumentasian; dan f. publikasi.”

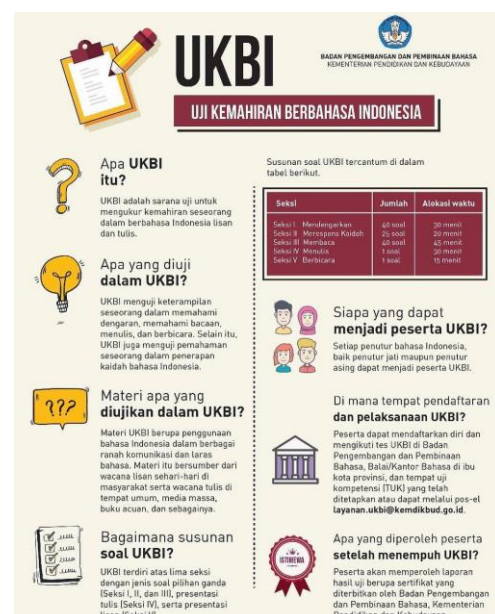
Terkait Pasal 16 ayat (2) butir d PP Nomor 57 Tahun 2014, terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016. Melalui peraturan tersebut, dikenal standar kemahiran berbahasa Indonesia yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (disingkat UKBI). Merujuk Pasal 1 ayat (2) disebutkan, “Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disingkat UKBI, adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.” Terkait itu, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan, “Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis.”

Di dalam tes UKBI, sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (2), terdapat pemeringkatan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia yang terdiri atas:

1. Peringkat I (Istimewa);
2. Peringkat II (Sangat Unggul);
3. Peringkat III (Unggul);
4. Peringkat IV (Madya);
5. Peringkat V (Semenjana);
6. Peringkat VI (Marginal); dan
7. Peringkat VII (Terbatas).

Berikut ini infografis tentang UKBI (Gambar 5) yang dapat dibaca

oleh masyarakat umum, termasuk orang asing. Melalui infografis itu, dapat dibaca perihal apa itu UKBI, apa yang diuji dalam UKBI, materi apa yang diujikan dalam UKBI, bagaimana susunan soal UKBI, siapa yang dapat menjadi peserta UKBI, di mana tempat pendaftaran dan pelaksanaan UKBI, dan apa yang diperoleh peserta setelah menempuh UKBI.



Gambar 5. Infografis UKBI

Sumber: badanbahasa.kemdikbud.go.id

Selain UKBI, Badan Bahasa juga menggalas kegiatan-kegiatan lainnya, seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN), Aksi Pengendalian Bahasa Negara, dan Diplomasi Kebahasaan melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). GLN diwujudkan melalui acara Festival Literasi Sekolah (FLS) yang pada tahun 2019 ini memasuki tahun ketiga. Dalam program prioritas tahun 2018, Badan Bahasa telah menargetkan terbitnya 305 buku,

hadirnya 68 komunitas binaan, dan munculnya kajian literasi. Pada tahun 2017, Pusat Pembinaan melalui Bidang Pembelajaran melaksanakan kegiatan penulisan bahan bacaan berupa ceita rakyat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai pendukung GLN.

Berikutnya, Aksi Pengendalian Bahasa Negara terbagi ke dalam tiga kegiatan besar, yakni (1) pengendalian bahasa di ruang publik, (2) pengendalian bahasa di lembaga pemerintah dan lembaga swasta, dan (3) pengendalian bahasa di lembaga pendidikan. Secara rinci, tiga kegiatan besar itu akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Pengendalian bahasa di ruang publik meliputi 54 kabupaten/kota (tahun 2012), 50 kabupaten/kota (tahun 2013), 13 kabupaten/kota (tahun 2014), 11 provinsi (tahun 2015), DKI Jakarta (tahun 2016), dan 109 kabupaten/kota (tahun 2017);
2. Pengendalian bahasa di lembaga pemerintah dan lembaga swasta meliputi 17 lembaga (tahun 2014), 15 lembaga (tahun 2015), 6 lembaga (tahun 2016), dan 7 lembaga (tahun 2017); dan
3. Pengendalian bahasa di lembaga pendidikan meliputi 18 lembaga (tahun 2014), 15 lembaga (tahun 2015), 5 lembaga (tahun 2016), dan 15 lembaga (tahun 2017).

Berikutnya, kegiatan Diplomasi Kebahasaan melalui BIPA telah dilakukan di sejumlah negara dan lembaga sebagai berikut.

1. Benua Amerika meliputi tiga negara, yaitu Amerika Serikat (23

lembaga), Cile (1 lembaga), dan Suriname (1 lembaga);

2. Benua Eropa meliputi delapan negara, yaitu Belanda (5 lembaga), Italia (10 lembaga), Prancis (6 lembaga), Bulgaria (2 lembaga), Jerman (14 lembaga), Rusia (11 lembaga), Inggris (4 lembaga), dan Polandia (3 lembaga);
3. Benua Asia meliputi 15 negara, yaitu Jepang (40 lembaga), Irak (1 lembaga), Arab Saudi (2 lembaga), Hongkong (1 lembaga), Tiongkok (2 lembaga), India (1 lembaga), Korea Selatan (1 lembaga), Myanmar (1 lembaga), Laos (1 lembaga), Vietnam (2 lembaga), Kamboja (5 lembaga), Singapura (3 lembaga), Filipina (10 lembaga), Timor Leste (5 lembaga), dan Thailand (31 lembaga); dan
4. Benua Afrika meliputi satu negara, yaitu Mesir (3 lembaga);
5. Benua Australia meliputi 56 lembaga.

Selain negara dan lembaga, hal lain yang juga perlu diketahui ialah jumlah pemelajar BIPA pada tahun 2017. Ada 22 negara asal pemelajar BIPA, yaitu Amerika Serikat (114 orang), Rusia (127 orang), Prancis (163 orang), Italia (88 orang), Inggris (175 orang), Jerman (56 orang), Finlandia (15 orang), Uzbekistan (150 orang), Thailand (9.620 orang), Kamboja (276 orang), Laos (40 orang), Malaysia (40 orang), Singapura (84 orang), Timor Leste (4.032 orang), Filipina (338 orang), Vietnam (182 orang), Australia (1.580 orang), India (86 orang), Jepang (24 orang), Mesir

(1.206 orang), Papua Nugini (3.093 orang), dan Tunisia (452 orang).



Gambar 7. Acara International Gathering Darmasiswa Tahun 2017
Sumber: dokumentasi pribadi

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016. Ketiga, Badan Bahasa telah melaksanakan perencanaan bahasa secara baik, sesuai dengan teori perencanaan bahasa Lauder & Lauder, berupa kegiatan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Gerakan Literasi Nasional (GLN), Aksi Pengendalian Bahasa Negara, dan Diplomasi Kebahasaan melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).



Gambar 8. Mahasiswa Darmasiswa UAD
Sumber: dokumentasi pribadi

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, diperoleh sejumlah simpulan. Pertama, teori perencanaan bahasa Lauder & Lauder yang menyebutkan bahwa perencanaan bahasa adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Bahasa, telah terbukti. Kedua, perencanaan bahasa dalam konteks bahasa Indonesia meliputi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Hal itu sudah sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, P., Hilaliyah, H., & Akbar, T. (2019). Pengutamaan bahasa Indonesia: Suatu langkah aplikatif. *El Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 17—24.
- Arifin, E. Z. (2018). “Undang-undang bahasa”: Sebuah instrumen bagi pembinaan bahasa dalam era globalisasi. *Pujangga*, 3(2), 1—24.
- Harahap, S. H. (2018). Kebijakan bahasa nasional versus sikap bahasa asing di Medan, Sumatera Utara. Dalam *Prosiding Seminar Internasional Riksa Bahasa XII*, 297-304. URL: <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/208>.
- Lauder, A. F. & Lauder, M. R. M. T. (2007). Berbagai kajian linguistik. Dalam Kushartanti dkk. (peny.), *Pesona bahasa: Langkah awal memahami linguistik* (220-248). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Masreng, R. (2017). Diplomasi bahasa menjembatani keragaman bahasa daerah dan pengutamaan bahasa Indonesia. *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 155—167.
- Paryono, Y. (2017). Peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 4(2), 163—173.
- Pastika, I. W. (2012). Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah: Peluang atau ancaman? *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 2(2), 141—162.
- Rambu, C. G. (2016). Penggunaan bahasa Indonesia dalam diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara ASEAN. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 6(1), 245—260.
- Ridlo, M., Amalia, R. M., & Rahmatunnisa, M. (2019). Situasi bahasa sebagai alat untuk perencanaan bahasa nasional. *Responsive*, 1(3), 86—89.
- Sudaryanto, Hermanto, & Wijayanti, D. (2018). Wacana padanan istilah asing-Indonesia dan kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. *Jurnal Pesona*, 4(2), 1—9.